

ABSTRAK

Arab Saudi sebagai negara satu-satunya di dunia yang tidak mengizinkan perempuan mengemudi dengan tidak merilis surat izin mengemudi akhirnya mencabut larangan tersebut. Selain itu, beberapa aturan pemerintah yang berimplikasi terhadap gerak perempuan juga dibuat, dilonggarkan bahkan dicabut. Reformasi sosial, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan yang merupakan beberapa poin dari *Saudi Vision 2030* –visi negara yang akan menjadi garis besar kebijakan Arab Saudi menuju tahun 2030– menyebabkan pemerintah Saudi mengubah kebijakan yang mempengaruhi gerak perempuan di ruang publik dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Perubahan kebijakan yang terjadi dikaji menggunakan teori kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan yang bermaksud untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Konsep perubahan kebijakan publik merujuk pada penggantian kebijakan yang sudah ada dengan satu atau lebih kebijakan yang lain dan salah satu alasan perubahan kebijakan adalah kebijakan yang ada menciptakan kondisi-kondisi yang membutuhkan perubahan karena tidak memadainya akibat atau adanya akibat-akibat yang bertentangan.

Saudi Vision 2030 sebagai visi negara yang baru memiliki salah satu tujuan untuk tidak lagi bergantung terhadap sektor migas sebagai pendapatan utama negara. Perubahan kebijakan yang terjadi dimaksudkan untuk memberikan perempuan Saudi keleluasaan agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian negara.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perempuan Arab Saudi, *Saudi Vision 2030*, Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan Perempuan.

**THE BACKGROUND OF THE SAUDI ARABIA GOVERNMENT'S
POLICY CHANGE ON WOMEN IN PUBLIC SPACES
DURING THE ADMINISTRATION OF
KING SALMAN BIN ABDUL AZIZ**

ABSTRACT

Saudi Arabia as the only country in the world that does not allow women to drive by not releasing a driver's license has finally lifted the ban. In addition, some government rules that implicate women's movements are also made, loosened and even repealed. Social reform, education, and women's empowerment are some of the main points of Saudi Vision 2030 –the country's new vision that will be the outline of Saudi Arabia's policy towards 2030– causing the Saudi government to change policies that affect women's movement in public spaces in order to achieve certain goals.

This policy changes are reviewed using the theory of public policy. Public policy is a decision that intends to address the problems that arise in a particular activity carried out by government agencies. The concept of public policy change refers to the replacement of an existing policies with one or more policies and one of the reasons for policy changes is that existing policies create conditions that require change due to inadequate consequences or conflicting consequences.

One of the goals of Saudi Vision 2030 is for the kingdom to no longer depend on the oil and gas sector as the main revenue. This policy change was intended to give Saudi women the freedom to participate in the country's economic development.

Keywords: Public Policy, Saudi Women, Saudi Vision 2030, Economic Development, Women Empowerment.